

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah bagian timur selama periode 2015-2019 jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah masuk pada kategori rendah sekali yang berarti pemerintah daerah masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) berada pada kategori sangat efektif karena telah mencapai target bahkan melebihi target penerimaan PAD yang telah ditetapkan. Namun, peningkatan PAD harus diperhatikan karena kontribusi PAD dibandingkan total pendapatan daerah masih relatif lebih kecil.

Rasio efisiensi belanja masuk pada kategori kurang efisien yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belanja hampir mendekati pendapatan daerahnya. Hal ini akan berpotensi mengalami defisit anggaran dalam APBD yang pada akhirnya digunakan pembiayaan daerah untuk menutupinya.

Rasio keserasian menunjukkan bahwa pemerintah daerah menggunakan sebagian besar dana yang dimiliki untuk dialokasikan pada belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Semakin besar dana yang dialokasikan untuk belanja operasi, itu berarti semakin kecil pula dana yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat.

Sedangkan untuk rasio pertumbuhan pendapatan secara keseluruhan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah bagian timur mengalami pertumbuhan yang dapat dikategorikan positif (baik), meskipun ada beberapa kabupaten/kota yang mengalami penurunan pendapatan pada tahun 2017 dan tahun 2018.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran dari penelitian ini sebagai berikut:

Pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat, meskipun telah efektif dalam merealisasikan PAD. Namun kontribusi PAD dibandingkan total pendapatan daerah masih relatif lebih kecil. Untuk itu, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi daerah dengan menggali berbagai sumber PAD guna menunjang kemandirian keuangan daerah. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.

Adapun intensifikasi adalah menghitung potensi pajak daerah dan retribusi daerah seakurat mungkin sehingga target penerimaan bisa mendekati potensinya. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan menggali sumber-sumber objek pajak ataupun dengan menjangkau wajib pajak baru. Sehingga hal ini dapat mendorong peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, kemampuan dan komitmen pegawai terutama pada petugas di lapangan dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi daerah harus ditingkatkan dan juga melakukan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak guna menunjang pembangunan daerah.

Penggunaan anggaran belanja kurang efisien, apalagi sebagian besar dana digunakan untuk belanja operasi. Untuk itu, kedepannya diharapkan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Bagian Timur dapat meminimalisir jumlah belanja terutama belanja operasi dengan disesuaikan dengan pendapatan daerahnya dan meningkatkan belanja modal untuk investasi melalui peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik yang dapat mendorong peningkatan ekonomi daerah. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah dan menghindari terjadinya defisit anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2014. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Atjo, H. 2019. *Urgensi “Provinsi Sultim” Dari Perspektif Pemindahan Ibu Kota Negara*. Antara Sulteng (Online)
(<http://www.sulteng.antaranews.com>. Di akses 28 Desember 2020)
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah. 2015-2019. *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2015-2019*. Palu: BPS.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- Feblin, A., & Yuliawati. 2020. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Oku Selatan Tahun Anggaran 2013-2017. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 11(1), 35–58.
- Firdausy, C. M. 2017. *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fitra, H. 2019. *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Malang: CV IRDH.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, H. F. 2020. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Journal of Economics and Business*, 4(1), 34.
- Haryanto, R. D. S. 2020. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 9(2), 1–15.
- Kurniawan, A. W., & Puspitaningtyas, Z. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M., Sulistyowati, F., & Purwanugraha, H. A. 2016. *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Ketiga). Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.

- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mutiha, A. H. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 -2014. *Jurnal Vokasi Indonesia*. Vol.4 No.3, 105-121
- Ngangi, anastasia I., Murni, S., & Untu, V. N. 2018. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 6(4), 4103–4112
- Nugroho, A. A. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali APBD 2008-2010*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pandjaitan, M. F., Tommy, P., & Untu, V. N. 2018. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2011-2016. *Jurnal EMBA*, 6(3), 1398–1407.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dearah.
- Raharjo, E. 2007. Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2(1), 37–46.
- Rahmayati, A. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Jurnal EKA CIDA*, 1(1).
- Ramadani, R. F. 2016. Analisis Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda. *Jurnal Ekonomi*. Vol. 5 No.3
- Ropa, M. O. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 4(2), 738–747.
- Siregar, B. 2017. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)* (Edisi Kedua). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&Q*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, H. 2019. Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*. Vol.7 No.1, 81-92
- Ulum, I. 2012. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar* (Edisi Pert). Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.